



Guru dan fasilitator INOVASI mendampingi siswa belajar membaca huruf di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
(©Tim Komunikasi INOVASI)

Risalah Kebijakan

Mewujudkan Lingkungan Belajar Setara, Inklusif, dan Adaptif Perubahan Iklim di Kabupaten Nagekeo

Mendorong Transformasi Sekolah Inklusif dan Tanggap Iklim di Kabupaten Nagekeo: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Setara



Capaian & situasi pembelajaran

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan murid di Kabupaten Nagekeo menguasai kemampuan dasar dengan cukup baik. Meski begitu, capaian tersebut bisa ditingkatkan lagi. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan kualitas lingkungan belajar, sehingga menjadi aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid.



Faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar

Di Kabupaten Nagekeo, kualitas lingkungan belajar terdampak oleh masih terjadinya perundungan dan kekerasan (termasuk kekerasan berbasis gender) di sekolah, norma budaya yang membatasi peran dan partisipasi perempuan, serta praktik pendidikan yang belum optimal mengakomodasi kebutuhan murid disabilitas. Situasi ini diperparah oleh langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang masih terbatas dan belum disesuaikan dengan konteks lokal.



Rekomendasi kebijakan

Penting bagi pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk segera mengambil langkah nyata. Dari pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan: (1) memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang responsif dan inklusif, (2) mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi murid disabilitas, (3) memperluas akses bantuan sosial bagi murid dari keluarga miskin dan berlatar belakang kompleks, serta (4) menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan.

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan skor literasi dan numerasi murid di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (Kemendikbud, 2022) sebagai berikut:

Literasi : Laki-laki 52,23; perempuan 56,01

Numerasi : Laki-laki 40,30; perempuan 39,39

Masing-masing skor tersebut lebih tinggi sekitar 6-10 poin dari nilai rata-rata provinsi. Meski begitu, capaian ini bisa berkembang lebih baik lagi.

Berdasarkan temuan riset, pelaksanaan, dan evaluasi program INOVASI, peningkatan hasil belajar murid dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kualitas lingkungan belajar. Sekolah akan menjadi tempat dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung jika memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta aksi perubahan iklim. Di Kabupaten Nagekeo, kesadaran, pengetahuan, dan praktik terkait isu-isu tersebut masih perlu diperkuat agar semua murid dapat berkembang optimal.

Temuan Utama

INOVASI telah melakukan pemetaan situasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dengan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Nagekeo pada Desember 2024. Dari pemetaan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid meliputi:



Kesetaraan gender

Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan sebanyak 1-3 dari 10 murid merasa tidak aman dari perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di sekolah (Kemendikbud, 2024). Sejumlah kasus kekerasan dilakukan oleh guru dan murid laki-laki, sementara korban kekerasan umumnya adalah murid perempuan. Pemangku kepentingan di sekolah belum paham sepenuhnya tentang definisi dan cakupan kekerasan. Akibatnya, langkah pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus kekerasan belum berjalan efektif.

Selain itu, aturan dan tradisi adat memperkuat norma dan stereotip gender tradisional. Hal ini membatasi peran dan tanggung jawab perempuan dalam pendidikan dan pemilihan karir, pengambilan keputusan di komunitasnya, serta penerimaan warisan keluarga.



Inklusi disabilitas dan sosial

Dari 627 murid penyandang disabilitas (usia 5-18 tahun), sekitar 25% tidak sekolah dan 75% bersekolah. Mereka belajar di sekolah non-inklusi (37%), sekolah inklusi (29%), atau sekolah luar biasa/SLB (9%) (BPS & Kemendikbud, 2023). Namun, bagi mayoritas murid di kelompok ini, akses ke dan di sekolah masih jauh dari memadai. Ketersediaan guru dan tenaga pendukung (terapis dan psikolog) dengan kualifikasi khusus, untuk mendukung kebutuhan spesifik mereka, masih terbatas.

Stigma sosial di masyarakat terhadap disabilitas pun masih kuat. Akibatnya, orang tua tidak menyekolahkan anak karena merasa tidak perlu atau takut anak mengalami perundungan. Namun, ketika di rumah, anak perempuan penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan seksual dari anggota keluarga atau orang terdekat mereka.

Di luar itu, masih banyak murid yang termarginalkan. Misalnya, murid yang berasal dari keluarga miskin, murid dengan latar belakang keluarga yang kompleks (orang tua tidak menikah, orang tua tunggal karena berpisah, atau tidak punya orang tua), dan murid belum fasih berbahasa Indonesia.



Perubahan iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)¹ Kabupaten Nagekeo mencapai 136,53 dari 250. Angka tersebut lebih tinggi dari indeks Nusa Tenggara Timur (132,81) dan Indonesia (132,25) (BNPB, 2023). Menurut IRBI, banjir serta gelombang ekstrem dan abrasi berisiko tinggi di kabupaten ini.

Sekolah dan masyarakat telah melakukan langkah mitigasi dan adaptasi secara mandiri, seperti mendaur ulang botol plastik dan menanam pohon. Namun, masih ada perilaku dan kebiasaan masyarakat yang merusak lingkungan. Misalnya, membuka lahan dengan cara membakar, meracuni air sungai dan rumput untuk kebutuhan berburu, dan memusnahkan rumput di sekitar rumah atau kebun. Pemerintah setempat pun masih membolehkan aktivitas pertambangan dan pembangunan gedung baru dalam skala besar, yang mengakibatkan kerusakan alam lebih signifikan.

¹ Penghitungan IRBI terdiri atas komponen bahaya (*hazard*, terkait fenomena alam), kerentanan (*vulnerability*, terkait kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas (*capacity*, terkait unsur ketahanan kelembagaan daerah).

Ketiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, sosial-budaya, dan geografis (interseksionalitas) berikut ini:



Kemiskinan

Kemiskinan menjadi pendorong utama keterlibatan anak-anak dalam kegiatan ekonomi, keterbatasan fasilitas pendukung bagi anak penyandang disabilitas, peningkatan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, serta kemunculan stigma sosial saat aturan dan upacara adat tidak mampu dipenuhi.



Gangguan belajar akibat perubahan iklim

Perubahan iklim berdampak langsung pada murid dan sekolah. Misalnya, angka kehadiran murid turun akibat cuaca ekstrem, anggaran sekolah terserap untuk perbaikan fasilitas, pemenuhan gizi dan kesehatan murid terganggu, serta akses bagi murid penyandang disabilitas lebih terbatas.



Risiko daerah terpencil

Kondisi daerah terpencil memperbesar ketimpangan akses dan fasilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas dan saat terjadi bencana.



Gender dan disabilitas

Anak perempuan penyandang disabilitas yang tidak bersekolah atau lebih banyak tinggal di rumah memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan seksual.



Risiko latar belakang keluarga kompleks

Latar belakang keluarga yang kompleks menyebabkan anak rentan menjadi korban stigma sosial, perundungan, dan kekerasan, sekaligus mendorong keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, kekurangan tenaga kerja di sawah dan ladang—akibat migrasi ke provinsi lain atau luar negeri—diisi oleh murid SD dan SMP pada jam pelajaran sekolah (mereka menanam, memanen, atau memisahkan cengkeh). Praktik ini seringkali diketahui oleh pihak sekolah, bahkan upah murid menjadi pemasukan tambahan sekolah. Akibatnya, ketidakhadiran murid meningkat serta terjadi eksploitasi anak oleh oknum guru, kepala sekolah, dan masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan

Melihat temuan tersebut, penting bagi pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk segera mengambil langkah nyata. Berdasarkan pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. Kebijakan ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan capaian belajar dan kesejahteraan murid.



Dinas Pendidikan: Memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan agar semakin responsif, inklusif, dan efektif

1. Memperkuat kapasitas dan peran Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah. Satgas akan bekerja sama dengan TPPK untuk mengadvokasi program pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, seperti pendidikan karakter dalam kurikulum, penyediaan fasilitas yang aman (seperti toilet terpisah dan layanan pengaduan), aturan dan SOP tertulis untuk kasus kekerasan, serta pendampingan korban dan saksi.
2. Memperkuat pelaksanaan program-program pengembangan kapasitas kepala sekolah dan guru, terutama mengenai pengelolaan perilaku dan penerapan disiplin positif di sekolah.



Dinas Pendidikan & Dinas Sosial: Mendorong pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas

1. Mengumpulkan data terkait ragam, tingkat kesulitan, dan kebutuhan murid penyandang disabilitas secara berkala dan mengelolanya secara terpusat melalui *dashboard* Profil Belajar Siswa (PBS), yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, data disabilitas bisa menjadi landasan pembentukan kebijakan dan pemberian dukungan untuk memenuhi akomodasi murid, khususnya dalam pembelajaran di kelas.
2. Memastikan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan di tingkat kabupaten berjalan secara optimal agar murid penyandang disabilitas bisa selalu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
3. Mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) agar layanan dan bantuan yang diberikan pada murid penyandang disabilitas semakin efektif dan tepat sasaran.
4. Mendorong dan memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak dapat selaras, komprehensif, dan tepat sasaran.
5. Melakukan sosialisasi program pendidikan inklusif, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat, melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan mengurangi stigma sosial dan risiko perundungan serta menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi murid penyandang disabilitas.



Dinas Sosial: Memperluas akses program kesejahteraan sosial dan bantuan ekonomi bagi murid dari keluarga miskin dan berlatar belakang kompleks

1. Melakukan sosialisasi program dan bantuan (seperti Program Keluarga Harapan dan Program Indonesia Pintar) secara langsung ke masyarakat, terutama murid dari keluarga miskin dan berlatar belakang kompleks. Melalui sosialisasi ini, mereka dapat mengetahui dan segera mengakses bantuan pendidikan yang relevan.
2. Bekerja sama dengan sekolah dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan jangkauan dan akses murid terhadap program dan bantuan pendidikan.
3. Mengawasi dan memastikan pemberian bantuan tepat sasaran dan digunakan untuk pemenuhan hak pendidikan murid.



Dinas Pendidikan & Dinas Lingkungan Hidup: Menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan

1. Mendukung pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang integrasi pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum. Regulasi ini bertujuan mengikat setiap sekolah untuk memasukkan isu perubahan iklim dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
2. Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk merancang skema evakuasi bencana di sekolah. Dengan begitu, murid dan guru memiliki kesiapsiagaan, mampu merespons bencana, dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.
3. Memperluas sosialisasi kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah berjalan, baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media digital, salah satunya dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Langkah ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku mereka.